



Paradiplomasi Jawa Barat terhadap Anhui dalam Memenuhi Kebutuhan Vaksin Covid-19 di Jawa Barat

Dinda Citra Widyani

Program Studi Magister Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Padjadjaran, Indonesia;

dinda19014@mail.unpad.ac.id

RMT Nurhasan Affandi

Departemen Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Padjadjaran, Indonesia;

rmthiunpad@gmail.com

Deasy Silvy Sari

Departemen Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Padjadjaran, Indonesia;

deasy.silvy@unpad.ac.id

| Submit: 02-02-2023 | Accept: 06-08-2023 | Publish: 31-08-2023 |

Keywords

Covid-19, PHEIC, International Cooperation, Health Diplomacy, Vaccines.

ABSTRACT

In 2019, people in Wuhan City were hit by an outbreak caused by the Covid-19 virus. Diseases caused by exposure to the Covid-19 virus cause malfunctions in the human respiratory system, so that it is at risk of causing death. The Covid-19 virus spreads through direct exposure from infected patients, as well as through intermediaries from inanimate objects. As a response to global health threats, WHO declared this virus to be a Public Health Emergency of International Concern (PHEIC), thus requiring international collaboration to reduce the risk of spreading this virus to the global community. The method used in this article is qualitative, through interviews and literature. The problem of the Covid-19 pandemic occurred when globalization was in the digital era, for this reason, this article also discusses the contribution of PT Biofarma as an important actor who plays a role in global health issues during the Covid-19 pandemic.

Kata Kunci

Covid-19, PHEIC, Kerja sama Internasional, Diplomasi Kesehatan, Vaksin.

ABSTRAK

Pada 2019, masyarakat di Kota Wuhan diterpa oleh wabah yang ditimbulkan oleh virus Covid-19. Penyakit yang ditimbulkan oleh paparan virus Covid-19 menimbulkan malfungsi terhadap sistem pernafasan manusia, sehingga beresiko menyebabkan kematian. Virus Covid-19 menyebar melalui paparan langsung dari pasien yang terinfeksi, maupun melalui perantara dari benda mati. Sebagai respons terhadap ancaman kesehatan global, WHO menyatakan virus ini berstatus sebagai *Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)*, sehingga membutuhkan interaksi kerja sama internasional untuk menekan resiko penyebaran virus ini bagi masyarakat secara global. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah kualitatif, melalui wawancara dan studi pustaka. Permasalahan pandemi Covid-19 ini terjadi ketika globalisasi di era digital, untuk itu, artikel ini juga membahas tentang kontribusi dari PT Biofarma sebagai aktor penting yang berperan dalam isu kesehatan global di masa pandemi Covid-19 ini.

PENDAHULUAN

Pada akhir 2019, dunia diterpa oleh penyebaran virus yang disebut *Corona Virus Disease* yang dikenal dengan istilah Covid-19. Wabah penyakit Covid-19 pertama kali muncul di Kota Wuhan, Tiongkok. Virus Covid-19 menyebar dengan cepat ke berbagai negara pada awal tahun 2020. Menggemparnya virus Covid-19 bermula dari tingginya kasus penyakit pneumonia, atau radang paru-paru yang menyebar di Kota Wuhan pada bulan Desember 2019. Kasus wabah penyakit radang paru-paru ini diduga berkaitan dengan pasar hewan Huanan di Wuhan, yang menjual berbagai jenis daging hewan, yang beberapa diantaranya tidak lazim dikonsumsi manusia. Hewan-hewan tersebut dikenal memiliki berbagai parasit dan bakteri yang dapat menjangkit imunitas manusia (www.news.detik.com, 2020).

Virus Covid-19 memiliki keterkaitan yang identik dengan wabah *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus* (SARS) yang muncul pada 2002 di kawasan Asia, yang menyerang sistem pernafasan masyarakat. Jenis virus serupa juga pernah terjadi di kawasan Timur Tengah, sehingga menyebabkan wabah *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) pada 2012 (www.covid19.go.id, 2022). Penyakit yang ditimbulkan dari virus Covid-19 memiliki gejala yang menyerupai penyakit flu, namun sifatnya mudah menular dan berkembang pesat, serta menyebabkan infeksi yang lebih parah, dengan memicu kegagalan organ dalam. (www.news.detik.com, 2020).

Pandemi Covid-19 meluas ke berbagai belahan dunia secara pesat, sehingga diperlukan penanganan sesegera mungkin. Pada 30 Januari 2020, WHO telah menetapkan isu paparan virus Covid-19 sebagai pandemi. Sebagai tindakan atas kasus pneumonia yang mewabah di Kota Wuhan, WHO memberlakukan sistem *lock down* di Kota Wuhan hingga pertengahan bulan Maret 2020. Pemberlakuan pembatasan sosial di Kota Wuhan, dan terus dilanjutkan secara bertahap hingga akhir tahun 2020 (www.news.detik.com, 2020).

Di Indonesia, virus Covid-19 mulai muncul pada Maret 2020. Saat itu, Presiden Joko Widodo mengumumkan dua orang dinyatakan positif mengidap virus tersebut. Dalam kurun waktu satu bulan setelah pengumuman, pada 21 April 2020, terdapat 7.135 kasus Covid-19. Sebanyak 842 pasien sembuh, dan 616 orang meninggal dunia (Bali IDN Times, 2020). Penyebaran virus Covid-19 di Indonesia menimbulkan aspek terhadap imunitas masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Dalam aspek kebijakan keimigrasian Indonesia, terdapat regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, melalui Peraturan No 3 Tahun 2020 tentang pemberhentian izin tinggal, serta pembatasan visa kunjungan bagi warga negara Tiongkok, agar penyebaran virus Covid-19 di Indonesia dapat dicegah (Permenkumham No 3, 2020). Dalam aspek sosial, pandemi Covid-19 mengharuskan kesiapan masyarakat untuk beradaptasi dengan gaya hidup baru, melalui pembatasan sosial yang diberlakukan untuk mengurangi risiko terpapar virus Covid-19 dalam jangka panjang. Kegiatan sosial ini menerapkan aturan penggunaan masker pada aktivitas di dalam ruangan, pembatasan jarak antar individu, serta pembatasan jumlah individu di dalam 1 ruangan, sehingga mencegah adanya kerumunan manusia (Purnama, et al 2020:64).

Upaya vaksinasi yang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia pada 2020, dinilai kurang gencar. Hal ini ditunjukkan oleh laporan dari *Economist Intelligence Unit*, yang menyatakan bahwa Indonesia akan menerima *supply* vaksinasi dosis pertama secara merata pada awal tahun 2021 (www.eiu.com, 2020). Urgensi Indonesia dalam ikhtiar menangani wabah covid-19 selaras dengan banyaknya kasus terpapar virus covid-19 yang belum dapat diatasi dengan baik, serta rendahnya jumlah penduduk yang telah melakukan vaksinasi, yaitu sebesar 5,2% dari total populasi masyarakat yang seharusnya layak untuk memperoleh vaksinasi (www.nytimes.com, 2021). Situasi ini cukup mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menghadapi ancaman penyebaran virus Covid-19, karena dibutuhkan imunitas tubuh yang prima, agar masyarakat Indonesia dapat melakukan aktivitasnya kembali seperti semula. Oleh karena itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan vaksinasi di Indonesia, diperlukan kerja

sama dengan negara lain. Upaya Pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan imunitas masyarakat terhadap kebutuhan vaksin melalui Diplomasi Vaksinasi dengan Tiongkok.

Kepentingan yang diprioritaskan oleh Negara Indonesia saat ini adalah ikhtiar untuk menangani pandemi virus Covid-19. Untuk itu, usaha yang diimplementasikan oleh Indonesia adalah melalui penguatan interaksi kerja sama global, dalam bidang infrastruktur dan tata kelola kesehatan, serta kemampuan ekonomi yang berbasis kemitraan dengan negara lain (www.kemlu.go.id, 2021). Secara rasional, pandemi Covid-19 juga menunjukkan kepentingan nasional masing-masing negara dalam rangka menjaga kedaulatan sosial, keamanan, dan ekonomi.

Diplomasi vaksin merupakan bentuk diplomasi baru (*new diplomacy*) yang dibentuk berdasarkan pada kerja sama bilateral maupun multilateral, dan bersifat transparansi. Interaksi diplomasi vaksin mengutamakan ehingga distribusi vaksin di dunia tersalurkan secara adil dan merata untuk perlindungan populasi secara global. Tugas utama dalam praktik diplomasi tidak hanya manajemen konflik, tetapi juga manajemen perubahan dan pemeliharannya dengan cara melakukan persuasi yang terus menerus di tengah-tengah perubahan yang berlangsung (Watson, 1984:223).

Untuk mendukung keperluan Diplomasi vaksin bagi isu kesehatan global, WHO telah membentuk platform koalisi, *Covid-19 Vaccines Global Access* (COVAX) yang terdiri dari 183 negara dalam upaya untuk menanggapi wabah tersebut (www.kemlu.go.id, 2021). Pada 28 Januari 2021, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menghadiri pertemuan COVAX *Advance Market Commitment Engagement Group* (AMC EG) dengan memaparkan memaparkan prioritas diplomasi dalam rangka “Membangun Kemandirian dan Ketahanan Kesehatan Nasional dan Jaminan kesehatan nasional.” Presiden Indonesia Joko Widodo menandatangani perjanjian dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, di mana ia mengatakan bahwa Tiongkok akan membantu Indonesia membangun pusat produksi vaksin, sembari bekerja untuk memvaksinasi penduduknya. Tiongkok dan Indonesia sangat mementingkan keselamatan dan kesehatan kehidupan masyarakat, dan mendelegasikan kegiatan vaksinasi nasional, khususnya untuk masyarakat Indonesia (www.kemlu.go.id, 2021).

Tiongkok merupakan mitra dagang yang penting bagi Indonesia, begitupun sebaliknya. Dalam sektor ekonomi, ketersediaan sumber daya alam, tenaga kerja yang murah hingga jumlah populasi penduduk yang terbilang cukup banyak menjadikan Indonesia memiliki keunggulan tersendiri bagi kerja sama ekonomi antara Indonesia-Tiongkok. Disisi lain Tiongkok memainkan berbagai peran sebagai konsumen, penyalur, pesaing, pembaharu inovator dan penyedia sumber daya manusia yang handal. Hal tersebut dibuktikan dengan kemajuan ekonomi yang terus meningkat tiap tahunnya.

Pada tanggal 30 November 2016, pertemuan bisnis dengan tema "Investasi dan Perdagangan di Indonesia" diadakan di Hotel Marriott di Timur Laut Beijing. Pertemuan ini diprakarsai oleh KBRI Beijing, bersama dengan 500 *China Top 500 Foreign Trade Enterprises*. Sekitar 80 tamu undangan dari pimpinan dan perwakilan 53 perusahaan di Beijing dan dari daerah sekitarnya seperti Qingdao, Tianjin, Henan dan Hebei hadir sebagai peserta. Sekretaris Jenderal dari *China Top 500 Foreign Trade Enterprises*, Mr. Huang Jun mengatakan bahwa Tiongkok dan Indonesia saat ini sedang melalui tahap perkembangan yang penting. Hal ini tentunya membutuhkan kerja sama yang erat, terutama di bidang perdagangan dan investasi. Dubes RI di Beijing juga memberikan gambaran tentang perekonomian Indonesia dan trennya di tahun 2017, serta peluang investasi di berbagai sektor (www.kemlu.go.id, 2016).

Tujuan pertemuan dari pertemuan ini untuk memberikan penjelasan kepada para pengusaha Tiongkok mengenai perkembangan ekonomi terkini di Indonesia, serta sebagai bentuk apresiasi kepada para pengusaha Tiongkok yang telah menjalin kerja sama yang baik dengan KBRI Beijing untuk mendukung hubungan ekonomi RI-RRT sejak tahun 2016. pertemuan di penghujung tahun 2016 ini melihat semakin eratnya hubungan kedua negara, baik antara pemerintah maupun antar pengusaha di kedua negara (www.kemlu.go.id, 2016).

Dalam bidang kesehatan, Indonesia dan Tiongkok merupakan negara yang berkontribusi pada forum kerja sama internasional *Global Health Security Agenda (GHS)*. Regulasi yang melandasi penanganan isu kesehatan global adalah *International Health Regulation (IHR)* yang disahkan pada tahun 2005. Sebagai langkah awal dalam menangani pandemi Covid-19, pada bulan Februari tahun 2020, Sinovac Biopharma Ltd mulai mengembangkan vaksin Covid-19, yang dinamakan ‘vaksin Sinovac’.

Vaksin ini diperoleh jaringan virus yang terkandung dalam sampel darah dari pasien yang terpapar virus Covid-19, yang status virusnya sudah dinonaktifkan. Saat disuntikkan ke dalam tubuh, vaksin ini bertugas merangsang tubuh untuk membentuk sistem kekebalan tubuh melawan virus Corona. Vaksin Sinovac diberikan melalui 2 dosis, dengan jarak dari dosis ke-1 hingga dosis ke-2, selama 3 hingga 5 bulan. (Puspitasari, 2020). Akan tetapi, virus Covid-19 yang terus mengalami mutasi menjadi variasi *deltacrone* dan *omicrone*, mengakibatkan virus ini memiliki tingkat kekebalan yang lebih kuat, sehingga vaksin Sinovac tidak cukup untuk mencegah paparan virus Covid-19 pada manusia. Oleh karena itu, pemerintah RI berdiplomasi kembali dengan Tiongkok untuk perolehan vaksin jenis *booster*.

Hubungan RI-RRT dalam bidang kesehatan dalam riset ini adalah melalui kegiatan diplomasi vaksin. Diplomasi vaksin dimulai oleh pertemuan antara Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, bersama Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi, dan Menteri BUMN RI Erick Thohir, dengan Pimpinan Provinsi di Fujian Tiongkok, untuk membentuk kesepakatan kerja sama vaksin, kesepakatan peningkatan perdagangan dan investasi, serta kerja sama di bidang konsuler. Pemerintah Provinsi Fujian menawarkan Perusahaan Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical untuk melaksanakan investasi produk vaksin Covid-19 di Indonesia.

Provinsi Anhui sudah menjalankan hubungan diplomatik dengan Badan Koordinasi penanaman Modal (BKPM) Indonesia, melalui *MoU Investment Promotion Cooperation between The Ministry Of Trade Republic Of Indonesia, and Anhui Province of The People's Republic of China* yang disahkan pada tahun 2013. Kerja sama bilateral RI-RRT di bidang kesehatan dilandasi oleh *MoU between the Department of Health RI and the Ministry of Public Health PRC*. Sebagai langkah persetujuan terhadap usulan dari Pemerintah Fujian mengenai kerja sama vaksin antara Indonesia dengan Perusahaan Multinasional dari Provinsi Anhui, KBRI Beijing memberi dukungan terhadap kemitraan vaksinasi Covid-19 RI-RRT (www.kemlu.go.id, 2021).

Indonesia memiliki MoU kerja sama kesehatan dengan Tiongkok, yang ditandatangani pada 28 November 2017. Bidang kerja sama yang dijalankan Indonesia-Tiongkok meliputi pelayanan kesehatan primer dan jaminan kesehatan bagi masyarakat sipil, pengendalian wabah penyakit, program kunjungan pertukaran tenaga ahli dan medis, pengembangan sumber daya manusia, dan kerja sama di bidang vaksinasi. Kerja sama di bidang industri kesehatan Indonesia memprioritaskan pada 3 sektor, diantaranya adalah: (1) Sektor farmasi, berupa pengembangan dan uji klinis terhadap produk obat-obatan dan vaksin, (2) Sektor logistik, berupa fasilitas dan kelengkapan alat-alat kesehatan, (3) Sektor perdagangan, berupa penyediaan barang dan jasa di bidang kesehatan. Ketiga sektor tersebut juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia (BPK Kemlu, 2018:66).

Dalam riset ini, aktor non-negara yang mendukung ketersediaan vaksin di Indonesia Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. Perusahaan ini merupakan produsen vaksin di Kota Hefei, Provinsi Anhui, Chongqing, Beijing, Tiongkok. Anhui Zhifei memproduksi vaksin Covid-19, dengan jenis “Zifivax”, atau disebut sebagai “Vaksin Anhui”. Vaksin ini dikenal sebagai vaksin sub-unit protein adjuvant Covid-19, yang dikembangkan oleh *Institute of Microbiology di Chinese Academy of Sciences*. Menurut pakar industri, produksi untuk jenis vaksin ini stabil dan dapat diandalkan, dan lebih mudah untuk mencapai produksi industri skala besar di dalam dan luar negeri (South China Monitoring Post, 2021). Vaksin produksi Anhui berbasis rekombinan, yaitu melalui rekombinasi genetika dari

kandungan RNA dari suatu virus yang sudah dimatikan. Untuk mengembangkan efektivitas vaksin yang dikeluarkan oleh perusahaan Anhui, maka perlu adanya pengembangan uji klinis dari perusahaan multinasional negara yang bekerja sama dengan Anhui.

Kerjasama vaksin yang dijalani oleh RI-Anhui diaplikasikan terhadap kondisi ancaman paparan virus Covid-19 di Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah dengan populasi terpadat di Indonesia, dengan penduduk berjumlah 48,27 juta jiwa. Dalam menekan angka penyebaran virus Covid-19 di provinsi Jawa Barat, diperlukan stok vaksin yang mencukupi populasi masyarakatnya. Upaya yang dijalankan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk mencapai *herd immunity* di Jawa Barat adalah melalui penyaluran vaksinasi terhadap 37.907.814 warga Provinsi Jawa Barat. Sasaran dari program vaksinasi Covid-19 di Jawa Barat terdiri dari beragam kalangan masyarakat, meliputi anak-anak, orang dewasa, lansia, petugas kesehatan masyarakat, dan tenaga pendidik. Akan tetapi, tantangan yang dihadapi oleh Jawa Barat adalah dalam lingkup teritorialnya yang cukup luas, diiringi dengan jumlah penduduk yang padat. Oleh karena itu, penyaluran vaksinasi di kota-kota atau kabupaten di Jawa Barat terkadang tidak merata (www.opendata.jabarprov.go.id, 2021). Untuk itu, fenomena ini menimbulkan interaksi paradiplomasi berdasarkan kepentingan Pemerintah Jawa Barat terhadap Perusahaan Anhui Zhifei dari Tiongkok, agar dapat menciptakan peluang bagi Indonesia untuk memproduksi vaksin Covid-19 dalam negeri.

Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical menanamkan investasi pada PT BCHT Biotechnology, sebagai institusi yang mengembangkan teknologi terhadap uji klinis vaksin Anhui di Indonesia. Setelah melalui tahap pengembangan rekombinan sel, vaksin Anhui akan melewati uji klinis yang dilakukan langsung oleh tubuh manusia. Kegiatan uji klinis ini dinaungi oleh PT Biotis Pharmaceutical Indonesia, sebagai perusahaan swasta di bidang farmasi yang dilibatkan oleh Pemerintah RI. Kegiatan uji klinis vaksin Zifivax produksi Anhui dijalankan di 2 wilayah dengan populasi padat penduduk di Indonesia, yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat.

Fakultas Kedokteran dari Universitas Padjadjaran merupakan institusi pendidikan yang menjalankan penelitian uji klinis vaksin Covid-19 jenis Zifivax produksi Anhui. Uji klinis tersebut dilakukan di Kota Jakarta dan Kota Bandung. Riset ini memfokuskan pada wilayah Jawa Barat. Pelaksanaan uji klinis vaksin Anhui di Bandung dilakukan di 6 rumah sakit di Bandung yang berperan sebagai lokasi uji klinis, antara lain: RS Hasan Sadikin, RS Immanuel, RS Advent, RS Al-Ihsan, RS Unggul Karsa Medika, dan RSIA Limijati. Tujuan dari uji klinis vaksin Anhui adalah untuk memperoleh izin edar di Indonesia (www.bbc.com, 2021). Terdapat Fenomena kebutuhan vaksin Covid-19 di Provinsi Jawa Barat menunjukkan upaya Pemerintah Jawa Barat untuk menjalankan paradiplomasi dengan Perusahaan Biofarmasi Anhui Zhifei Longcom, dapat dinilai sebagai upaya kerja sama bilateral RI terhadap RRT.

Dalam konteks kebijakan berbasis situasi di tingkat subnasional, kebijakan untuk menangani pandemic covid-19 tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Hal ini mempertimbangkan bahwa setiap negara akan melakukan penyesuaian dan mempelajari praktik keberhasilan dan kegagalan yang telah diterapkan di tempat lain (mancanegara serta sub-nasionalnya), terutama yang memiliki model kebijakan dengan relevansi yang memadai (Dobbs, 2020). Pada dasarnya, hal tersebut dapat dilihat. Begitupun untuk penanganan kesehatan masyarakat, bukan hanya pemerintah pusat saja, melainkan juga oleh pemerintah daerah. tidak hanya pemerintah pusat yang melindungi kesehatan masyarakat di ranah nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, Pasal 1 Ayat 1 tentang "Hubungan Luar Negeri", menyatakan bahwa hubungan luar negeri adalah segala kegiatan yang mencakup aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di pusat dan daerah. melalui lembaga-lembaga negara, atau Badan Usaha, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, SDM, atau warga negara Indonesia. (UUD 37/1999, No. 3882).

Kerja sama luar negeri oleh daerah otonom jika dilihat dari sudut pandang studi hubungan internasional, secara teoritis, merupakan hubungan yang tidak lagi bersifat *state-centric* di mana aktor-aktor non-pemerintah dapat secara leluasa memby pass hubungan dengan tanpa melibatkan pemerintah pusat. Interaksi dalam hubungan internasional yang bercorak transnasional ini memang menjadi kecenderungan dunia setelah munculnya era globalisasi. berbagai aktor, antara lain berbagai jenis kelompok, baik itu negara atau kelompok negara, pemerintah, warga negara, aliansi-aliansi, organisasi internasional, maupun kegiatan investasi dan perdagangan luar negeri (Mukti, 2013:5).

Dalam perkembangan bidang kaji Hubungan Internasional, fenomena ini menunjukkan bahwa aktor subnasional dan aktor non-negara dapat menjalankan program kerja sama secara proaktif. Prosedur yang dilakukan tetap harus melalui arahan dari pemerintah pusat. Kegiatan paradiplomasi dijalankan melalui prosedur dan kesepakatan internasional, sebagai upaya pemanfaatan sumberdaya luar negeri, untuk menyelesaikan beberapa masalah tanpa selalu bergantung pada pemerintah pusat (Alvarenga et al, 2020:2).

Hubungan dan kerja sama luar negeri dapat pula dilaksanakan oleh aktor-aktor individu yang berkontribusi pada keberlangsungan perjanjian diplomatik. Diantaranya adalah pengusaha, ilmuwan, politisi, para pejabat daerah, atau kalangan akademis, yang memiliki peran berdasarkan kapasitas kepentingan diplomatiknya, serta tidak boleh bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia, yang tidak boleh bertentangan dengan kebijakan luar negeri di Indonesia (Deplu, 2007).

Setelah kewenangan melakukan hubungan internasional diberikan kepada daerah otonom atau pemerintah daerah, semua pemangku kepentingan segera berbenah, untuk menjalankan kepentingan wilayahnya. Pemerintah pusat melalui pertemuan yang dijalankan Kementerian Luar Negeri, menyiapkan segala pedoman tata laksana penyelenggaraan hubungan dan kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemda, pemda-pemda melakukan pembenahan-pembenahan internal birokrasi, demikian pula kalangan bisnis dan swasta mulai mengkaji peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan serta dengan pihak asing, di mana mereka akan bekerja sama (Mukti, 2013:10).

Riset ini memiliki relevansi terhadap artikel yang ditulis oleh Valerie Tania Margono, et, al. (2021), yang berjudul “Aktivitas Diplomasi Kesehatan Indonesia-Tiongkok di Masa Pandemi COVID-19”. Artikel ini menekankan bahwa konsep *health-security* digunakan untuk kepentingan “*human rights*” & “*good-politics*”. Artikel ini membahas tentang kerja sama vaksin dapat meningkatkan ketergantungan Indonesia pada Tiongkok dan dapat berujung pada kerugian. Tidak hanya itu, ancaman lain yang ditemukan adalah bagaimana vaksin yang dibuat oleh Tiongkok masih ditolak oleh beberapa negara. Akan tetapi, masih banyak negara-negara yang merasa skeptis dengan kemampuan vaksin tersebut. Hal-hal ini tentu menjadi ancaman yang harus diatasi, karena jika dihindari terus menerus kedepannya akan menjadi rumit. Untuk itu, kegiatan paradiplomasi Jabar-Anhui terhadap pengembangan vaksin rekombinan Anhui merupakan upaya untuk menyesuaikan kebutuhan vaksin terhadap imunitas tubuh manusia dari ancaman mutasi penyakit *coronavirus* (Margono, et al. 2021).

Dalam tinjauan studi terdahulu yang kedua, periset meninjau dari artikel yang ditulis oleh Ramdhan Muhamin, (2021), yang berjudul “Diplomasi Vaksin Covid-19 dan Budaya Anarki dalam Sistem Internasional” Diplomasi Vaksin bersifat “Diplomasi Multijalur”, yang dalam pandangan Budaya Anarki, langkah-langkah diplomatik yang dijalankan oleh suatu negara untuk mendapatkan vaksin, dapat bersifat kompetitif dan kooperatif. Artikel ini menjelaskan bahwa Meski distribusi vaksin Covid-19 dilakukan melalui mekanisme COVAX, distribusi vaksin di berbagai negara tetap tidak merata. Terjadi ketimpangan antara negara kaya dan negara miskin. Diplomasi kompetitif di antara negara-negara kaya dalam memenuhi kebutuhan vaksinnya telah mengabaikan kebutuhan negara-negara miskin untuk memperoleh hak yang sama terkait vaksin (Muhamin, 2021).

Dalam studi terdahulu yang ketiga, periset meninjau dari artikel yang dituliskan oleh Takdir Ali Mukti, et al. (2020), dengan judul “*Paradiplomacy Policies and Regional Autonomy in Indonesia and Korea*”. Artikel ini membahas tentang perbedaan sistem paradiplomasi yang dimiliki oleh Negara

Indonesia, dan Negara Korea. Artikel ini membahas tentang perbedaan yang signifikan antara kriteria paradiplomasi yang dijalankan oleh Indonesia dan Korea. Di Indonesia, semua perjanjian kerja sama yang direncanakan oleh pemerintah daerah harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak dapat bertindak atas nama daerah, tetapi mereka harus bertindak atas nama pemerintah pusat dengan memberikan 'surat kuasa penuh' kepada kepala daerah. Kemlu berperan sebagai satu-satunya pintu segala urusan dengan pihak asing, atau sebagai 'one gate policy', sebagai pihak yang membuat perjanjian internasional, sekalipun dilakukan oleh pemerintah daerah. Sedangkan, Pimpinan Negara Korea memberi wewenang lebih banyak terhadap pemerintah daerah dalam menjalankan diplomasi regional, serta memberikan kepercayaan secara penuh pada daerah untuk melaksanakannya.

Politik paradiplomasi yang dibahas dalam artikel ini adalah mengenai kesamaan mengenai isu paradiplomasi antara Korea dengan Indonesia, yaitu dengan melibatkan peran pemerintah pusat yang memegang kendali umum atas aktivisme paradiplomatik di kedua negara, meskipun Pemerintah Korea memberikan lebih banyak kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan paradiplomatiknya. Kondisi politik dalam negeri yang berbeda antara Indonesia dan Korea, berkaitan dengan adanya gerakan separatis yang mempengaruhi politik lokal, menjadi pertimbangan serius bagi Pemerintah Indonesia dalam merancang kebijakan diplomasinya dalam kerangka otonomi daerah (Mukti et al, 2020). Artikel ini juga membahas tipologi dalam desain paradiplomasi, yang akan periset gunakan sebagai model analisis dalam riset ini.

KERANGKA KONSEPTUAL

Diplomasi Kesehatan

Dalam permasalahan global yang terjadi pada dinamika hubungan internasional, terdapat 2 karakteristik yang mengklasifikasi isu politik dunia, yaitu *high politics* dan *low politics*. Karakteristik *high politics* biasanya dikaitkan dengan identifikasi permasalahan militer, terorisme, dan keamanan nasional, sedangkan *low politics* mengacu pada bidang ekonomi, hak asasi manusia, pendidikan, maupun isu lingkungan hidup (Whytock, 2005:19). Untuk itu, konteks diplomasi kesehatan dalam praktik kebijakan luar negeri bersifat *low politics*, karena menekankan pada hak asasi bagi tiap individu dalam memperoleh fasilitas kesehatan yang baik, memprioritaskan pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan sistem kesehatan di negara-negara berkonflik, sehingga dapat menjadi tujuan keamanan nasional dalam kebijakan luar negeri, dan dapat mempengaruhi kekuatan dan kestabilan suatu negara (Feldbaum & Michaud, 2010:1).

Diplomasi kesehatan menghasilkan konsep *health security* terhadap kesehatan penduduk untuk masing-masing negara yang terlibat. Selain itu, diplomasi kesehatan juga meningkatkan hubungan antar negara, dan membangun komitmen di antara berbagai aktor, untuk bekerja sama dalam menempatkan isu kesehatan sebagai *human rights*. Kegiatan diplomasi kesehatan mengawasi ancaman yang dialami oleh berbagai negara terhadap penyebaran penyakit menular, yang dapat menyebar melalui lintas batas negara (Fidler, Cooper, Heine, 2013:691).

Pada tanggal 30 Januari 2020, *World Health Organization* (WHO) telah menyatakan bahwa virus Covid-19 merupakan darurat kesehatan yang meresahkan dunia, atau disebut dengan *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC). Dalam rangka menekan penyebaran virus Covid-19 terhadap masyarakat di seluruh dunia, maka diberlakukanlah *International Health Regulations* (IHR, 2005) yang dilaksanakan di pelabuhan, bandara, dan Pos Lintas Batas Darat Negara, melalui kegiatan karantina, pemeriksaan alat angkut, pengendalian vektor, serta tindakan sterilisasi menggunakan disinfektan (Kemenkes RI, 2020).

Diplomasi kesehatan yang dijalani Indonesia dalam mencegah penyebaran Covid-19 dilaksanakan melalui kerja sama bilateral, dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki

kemampuan dan pengalaman dalam menangani tingginya kebutuhan masyarakat di suatu wilayah terhadap ketersediaan vaksin. Upaya ini dapat dilihat dari kerja sama Indonesia dengan 14 negara mulai dari bantuan logistik dan teknik untuk penanganan Covid-19 sampai dengan kerja sama riset vaksin dan pengembangan produksinya (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021). Sebagai wujud dari upaya diplomasinya, Indonesia berhasil mendapatkan vaksin Sinovac (Tiongkok), Pfizer (AS), dan AstraZeneca (Inggris). Diplomasinya secara bilateral yang utama adalah memastikan ketersediaan jatah 20% dari populasi yang disediakan oleh WHO (Wangke, 2021:10). Indonesia menjadi negara pertama yang menerima vaksin di luar Tiongkok dan memiliki rencana yang paling komprehensif di negara ASEAN, rencana tersebut berupa uji klinis vaksin, pengiriman vaksin ke Indonesia, serta distribusi dan perluasan vaksinasi (www.liputan6.com, 2021)

Praktik diplomasi kesehatan yang dijalankan Indonesia-Tiongkok juga ditunjang oleh lembaga-lembaga yang bersifat non-negara, dan lembaga dibawah pemerintahan negara. Tiongkok merupakan salah satu negara sebagai produsen vaksinasi terbesar di dunia. Tiongkok memproduksi vaksin Sinovac sejak Bulan Mei 2020, dan dinobatkan sebagai vaksin pertama yang masuk ke Indonesia. Vaksin ini dikembangkan oleh Perusahaan Sinovac *Biotechnology*, dan diedarkan sejak Bulan Agustus 2020, dan digunakan oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia, sebagai vaksin dosis ke-1 dan dosis ke-2.

Seiring berkembangnya mutasi dari virus Covid-19 di Tiongkok, menimbulkan upaya oleh Pemerintah Tiongkok untuk memproduksi vaksin dosis ke-3 atau vaksin *booster*, Tiongkok mulai mengembangkan vaksin jenis baru. Salah satu perusahaan yang berkontribusi terhadap produksi vaksin *booster* dari Tiongkok adalah Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, yang mengembangkan vaksin rekombinan virus corona, yang diberi nama vaksin Zivifax, pada bulan April tahun 2021. Dalam interaksi diplomasi vaksin yang dijalankan oleh RI-RRT, Perusahaan Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, bekerja sama dengan PT Biotis Pharmaceutical Indonesia, dalam rangka mengembangkan vaksin jenis Anhui, sebagai upaya dari Pemerintah RI dalam memproduksi vaksin dalam negeri di Indonesia. Uji klinis vaksin Anhui dilaksanakan di Kota Bandung, yaitu di RS Hasan Sadikin, RSIA Limijati, RS Immanuel, RS Advent, RS Al-Ihsan, RS Unggul Karsa Medika. Kegiatan pengembangan vaksin jenis Anhui memiliki relevansi terhadap urgensi kebutuhan vaksin Covid-19 di Jawa Barat.

Interaksi diplomasi kesehatan antara Indonesia-Tiongkok difokuskan melalui kegiatan paradiplomasi dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai aktor subnasional dari Indonesia, dengan aktor non-negara dari Tiongkok, yaitu Perusahaan Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. Kerja sama di bidang vaksinasi Indonesia-Tiongkok dilandasi oleh konsep Human Security, dimana kedua negara tersebut ingin memberikan rasa aman bagi masyarakatnya, dan terhindar dari ancaman kesehatan. Penelitian ini juga menggunakan *human security*, sebagai landasan dari kepentingan pihak Tiongkok dalam menjalankan kerja sama daerah antara Anhui dengan Jawa Barat.

Paradiplomasi

Dalam buku yang dituliskan oleh Ivo Duchacek dan Paniotis Soldatos, paradiplomasi mengacu pada aktivitas diplomasi yang dilaksanakan oleh aktor sub-nasional, yang dirancang untuk mendukung, melengkapi, mereplikasi, atau menentang perjanjian-perjanjian diplomasi negara-bangsa (Soldatos & Duchacek, 1990:34). Paradiplomasi adalah desentralisasi kekuasaan politik dan otoritas administratif dalam proses yang terjadi pada actor sub nasional, atau lembaga-lembaga politik, atau kebijakan publik, dalam otoritas yang berbeda di bawah kendali pemerintah pusat dalam kewenangan menjalankan hubungan luar negeri (Mukti, 2013:15). Kegiatan paradiplomasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sebagai aktor utama didalamnya tetap berkomunikasi dengan pihak pemerintah pusat dalam penyelenggaraan kegiatan dalam aktivitas internasional. Pemerintahan pusat sendiri harus membagi *power* maupun kewenangan dengan pemerintah daerah dalam mengatur daerah otonomnya, melalui

macam-macam kegiatan yang sifatnya jauh dari dimensi perpolitikan kepada pihak asing, dengan membangun kegiatan diplomasi bersama aktor-aktor non pemerintah.

Paradiplomasi mengacu pada perilaku dan kemampuan untuk melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing, yang dijalankan oleh aktor “sub-state”, yang mencakup pemerintah lokal, pemerintah provinsi, ataupun perwakilan teritorial, dalam konteks kepentingan nasional yang bersifat spesifik (Wolff, 2009:13). Dewasa ini, kehadiran paradiplomasi menjadi fenomena yang sangat kuat, karena seiring dengan berjalannya waktu, maka semakin terbukanya peluang akses bagi *non-state actor* dalam meningkatkan perannya di kancah hubungan internasional. Perkembangan aktor yang berkontribusi dalam praktik paradiplomasi dapat memberikan peluang bagi perkembangan duatu daerah memiliki kesempatan untuk meningkatkan perdagangan, investasi dan kemungkinan berbagai bentuk kerja sama dengan pihak di luar batas yurisdiksi negara (Harakan, 2020:24).

Alexander S. Kuznetsov dalam penelitian paradiplomasi yang dipublikasikan pada penelitian yang berjudul “*An Administrative History of the Government of Alberta*”, mengemukakan bahwa Indikator dalam terbentuknya *state centric diplomacy*, adalah melalui kepentingan yang dirancang oleh Kementerian Luar Negeri, untuk membangun kerja sama berdasarkan kepentingan ekonomi, melalui perjanjian dengan mitra asing, maupun melalui komoditi ekspor dan impor. Untuk itu, pendekatan ekonomi memiliki relevansi terhadap kegiatan operasional Paradiplomasi (Kuznetsov, 2015:12). Periset meninjau tipologi paradiplomasi yang dikemukakan oleh Takdir Ali Mukti (2020). Takdir Ali Mukti membagi tipologi paradiplomasi menjadi tiga jenis desain kebijakan paradiplomasi, yaitu *isolative*, *conservative*, dan *progressive*.

1. *Isolative* memiliki arti bahwa kegiatan hubungan luar negeri harus dilakukan atas perintah kepala negara, dan tidak ada inisiatif dari pemerintah daerah, untuk melakukan hubungan luar negeri secara mandiri.
2. *Conservative* merupakan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah, untuk melakukan hubungan luar negeri, yang dikoordinasikan oleh pemerintah pusat.
3. *Progressive*, merupakan rancangan dimana pemerintah daerah lebih bebas untuk memulai kerja sama luar negeri dan dapat langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah tanpa harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah pusat. Praktik paradiplomasi dalam rancangan *progressive* dijalani oleh perwakilan diplomat suatu wilayah, yang dikenal sebagai “*honorary advisory*”, yang kemudian ditempatkan di wilayah luar negeri untuk bertugas sebagai *market intelligence*.

Berdasarkan fenomena pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang sudah dijabarkan di atas, kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah selalu berasal dari pemerintah pusat. Untuk itu, perlu diketahui bahwa fenomena paradiplomasi tidak berdiri sendiri, melainkan melalui proses yang bertahap. Paradiplomasi memiliki 4 indikator sebagai landasan terbentuknya paradiplomasi berdasarkan 4 indikator utama, yaitu: (1) Kebijakan Luar Negeri, (2) Hubungan Diplomatik, (3) Pembuatan Dokumen Kerja sama dengan pihak asing, serta (4) Peluang investasi luar negeri. Berdasarkan karakteristik paradiplomasi yang dimiliki oleh Tiongkok Indonesia, kategori *conservative* dan *isolative* paradiplomasi dapat dikemukakan oleh tabel berikut ini:

Tabel 1. Tipologi Paradiplomasi

No	Types <i>Indicators</i>	<i>Conservative</i> (Indonesia)	<i>Isolative</i> (Tiongkok)
1	Kebijakan Luar Negeri	Pembagian kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.	Dikoordinasikan secara menyeluruh oleh pimpinan negara.
2	Hubungan Diplomatik	Landasan kesepakatan paradiplomasi diawali oleh pertemuan dari perwakilan pemerintah pusat.	Tidak ada otoritas insentif kerja sama luar negeri, namun penugasan dari pusat.
3	Pembuatan Dokumen dengan Pihak Asing	Berdasarkan arahan dari pemerintah pusat, lalu diserahkan pada DPRD (<i>full power</i>)	Hanya ada peran lembaga yang ditunjuk oleh perwakilan dari pemerintah pusat
4	Peluang bagi Investasi Luar Negeri	Hanya ada lembaga perwakilan dari Negara. Seperti kementerian-kementerian	Semuanya Berdasarkan arahan dari pemerintah pusat (<i>full power</i>)

Sumber: Mukti (2020:40)

Health Security

Koplan Koplan et al. mendefinisikan Global Health Security sebagai: “*an area for study, research and practice that places a priority on improving health and achieving equity in health for all people worldwide*” (Koplan, et al., 2009).

Aspek dari *Health Security* yang diimplementasikan oleh Indonesia adalah melalui partisipasinya dengan GHSA (*Global Health Security Agenda*). GHSA merupakan forum inisiatif global yang bertujuan untuk mendeteksi, mencegah, dan menanggapi berbagai ancaman penyakit menular di tingkat global (www.kemkes.go.id, 2018). GHSA melibatkan *multi-stakeholders*, bersifat multisektoral dan didukung oleh lembaga dan organisasi di bawah kewenangan dari PBB, diantaranya adalah *World Health Organization (WHO)*, *Food and Agricultural Organizational (FAO)*, *World Organization for Animal Health (OIE)*, dan Bank Dunia dalam mengembangkan prosedur dalam kolaborasi yang dilaksanakan oleh GHSA (www.maritim.go.id, 2022).

Dasar dalam pelaksanaan agenda *global health security* adalah melibatkan aktor pemerintah di setiap negara, dalam membuat kebijakan untuk menyikapi penyebaran wabah penyakit, sebagai ancaman yang serius bagi negaranya. Wabah penyakit dapat menyebar melalui aktivitas atau mobilisasi makhluk hidup, seperti melalui kegiatan perjalanan, migrasi, perdagangan, atau distribusi makanan global. Penyebaran penyakit menular ini menciptakan kebutuhan akan solusi global yang ditandatangani sebagai undang-undang pada tahun 2005, oleh 194 negara anggota WHO, sebagai *International Health Regulation (IHR)*. Agenda program ini adalah membantu negara mengembangkan laboratorium nasional untuk kebutuhan uji klinis terhadap penyakit menular, yang berfungsi sebagai pusat pelaporan kesehatan masyarakat berbasis elektronik, serta pusat pengendali darurat (www.dinkeslampung-prov.go.id, 2022).

Sistem tanggap darurat yang darurat untuk isu kesehatan global adalah dengan memperkuat pengawasan terhadap laboratorium untuk, mencegah kerusakan tatanan negara yang diakibatkan oleh epidemi. Konsep ini dilaksanakan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit yang dikenal dengan lembaga *Centers for Disease Control and Prevention (CDC)* (www.p2p.kemkes.go.id, 2021). Dalam menjalankan tujuannya, GHSA menggunakan pendekatan multilateral dan bersifat multisektoral untuk memperkuat kemampuan nasional, dan global untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani ancaman penyakit menular. Strategi kolaborasi GHSA berfokus pada upaya penguatan kapasitas nasional masing-masing negara, khususnya dalam mencegah, mendeteksi, dan mengendalikan penyebaran penyakit. Secara teknis, ada 11 paket aksi prioritas, yaitu: (1) Pengelolaan *Anti Microbial Resistance (AMR)*, (2) Pengendalian terhadap penyakit *Zoonosis*, (3) Pemberlakuan *Biosafety* dan *Biosecurity*, (4) Tindakan Imunisasi secara dini, (5) Penguatan sistem pada laboratorium nasional, (6)

Tindakan Surveillance, berupa pengawasan terhadap produk-produk perdagangan luar negeri, (7) Membentuk pusat pelaporan dan bantuan yang responsif, (8) Penguatan kualitas SDM, (9) Penguatan terhadap pusat tanggap dan darurat, (10) Membentuk kerangka hukum bersifat multisektoral, serta (11) Mobilisasi bantuan dan tenaga medis (www.kemkes.go.id, 2018).

Berdasarkan uraian aksi prioritas GHSA di atas, tindakan penanganan wabah secara sistematis dan terprogram yang dijalankan oleh GHSA diklasifikasikan melalui 3 tahapan tindakan, yaitu *prevent, detect, and response* (www.soroylardo.com, 2019). Tindakan *Prevent* bertujuan untuk mencegah terjadinya wabah penyakit, yang terdiri dari empat tindakan, meliputi pengendalian resistensi antimikroba, pengendalian penyakit *zoonosis*, *biosafety* dan *biosecurity*, serta tindakan imunisasi secara dini. Tindakan *Detection* bertujuan untuk mendeteksi segala ancaman, melalui penguatan sistem laboratorium nasional, pemantauan, pelaporan, dan penguatan sumber daya manusia (SDM). Tindakan *Response* merupakan tanggapan yang bertujuan untuk merespons dengan cepat dan efektif, melalui prosedur dari kerangka hukum multisektoral, serta memobilisasi bantuan dan tenaga medis (www.kkpmakassar.com, 2018).

GHSA dan SDGs memiliki kekuatan-kekuatan itu saling ketergantungan satu sama lain. SDGs pada dasarnya adalah proses penyatuan bahasa universal pembangunan berdasarkan artikulasi konsep keseimbangan sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam ruang lingkup sinergi untuk mengubah *sustainability behaviour* (perilaku keberlanjutan). Isu Ketahanan Nasional Merekonstruksi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) dengan mengembangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai *scientific health security* (alat ilmiah untuk mengukur ketahanan kesehatan), untuk meningkatkan ketajaman kebijakan inklusi dan ketahanan. Perilaku keberlanjutan tersebut adalah pemberdayaan ekosistem sebagai indikator pembangunan sosial, melalui ketahanan nasional yang diasah melalui pendidikan bagi masyarakat, serta melibatkan aktor daerah. Pendidikan dan pengembangan sektor daerah mulai dikembangkan, sehingga memiliki kekuatan sumber daya manusia yang profesional, untuk bekerja sama dan menjaga *networking health security* (www.soroylardo.com, 2019).

Konstruktivitas GHSA digunakan sebagai jembatan kolaborasi kesehatan dan keselamatan masyarakat dalam menghadapi ancaman biologis. Keterlibatan kesehatan global harus tumbuh dalam kerangka keamanan nasional, melalui kolaborasi multisektoral. Upaya multisektoral internasional sedang memperkuat kapasitas dan sumber daya sektor kesehatan untuk menghadapi ancaman biologis. GHSA mendukung pelayanan keselamatan masyarakat, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat merupakan nilai kritis dalam mencegah dan menanggapi ancaman biologis yang mungkin terjadi secara alami, tidak disengaja, atau sebagai akibat dari teroris dan ancaman senjata biologis (www.p2p.kemkes.go.id, 2018).

GHSA sebagai gerakan koordinasi internasional berupaya membentuk jaringan kesehatan multisektoral, dan secara kolektif bekerja untuk keamanan global. Tujuan dalam GHSA juga memprioritaskan pembangunan nasional, penyediaan anggaran khusus untuk ketahanan kesehatan global, penjangkauan dan simulasi penanggulangan wabah, serta pendidikan mengenai ketahanan kesehatan global dalam pendidikan formal dan informal dan informal. (www.sehatnegeriku.kemkes.go.id, 2018).

Penguatan jangka panjang melalui kerja sama, kepercayaan, dan kemampuan untuk mengurangi ancaman biologis. Tiga prioritas yang difokuskan dalam program GHSA adalah:

- 1) Pencegahan wabah;
- 2) Deteksi dini terhadap ancaman biologis,
- 3) Tanggapan yang cepat dan efektif terhadap peristiwa biologis sebagai masalah yang menjadi perhatian internasional.

Agenda GHSA didukung oleh *Performance of Veterinary Service Pathway* OIE, dan kerangka kerja keamanan kesehatan global lainnya. Kolaborasi ini dipimpin dan didukung oleh GHSA *Steering Committee* (SC) yang beranggotakan 10 negara, yaitu Chile, Finlandia, Amerika Serikat, Kanada, Kenya, Italia, Saudi Arabia, Korea Selatan, dan Indonesia. Negara-negara tersebut berperan sebagai 'ketua' dari setiap forum GHSA, yang akan dipilih dari negara yang berbeda setiap tahun (www.kkpmakassar.com, 2018).

METODE RISET

Riset ini menggunakan metode penelitian kualitatif, melalui sumber data yang diperoleh secara primer dan sekunder. Untuk data primer, periset memperoleh data melalui wawancara, sedangkan untuk data sekunder, periset memperoleh data melalui studi pustaka.

Wawancara yang dilaksanakan dalam riset ini bersifat prosedural dan kontekstual, dimana partisipan yang dipilih adalah Staf dari pihak *Digital Healthcare* PT Biofarma Persero Branch, untuk mengungkapkan pengalamannya terhadap kinerja Biofarma sebagai BUMN dalam mengendalikan penyebaran virus Covid-19 melalui aplikasi digital. Studi pustaka juga dilakukan dengan cara laporan kinerja PT Biofarma, laporan Kementerian Luar Negeri, laporan Kementerian Kesehatan, buku, artikel, jurnal, serta berita tentang pandemi Covid-19 yang beredar di berbagai media massa.

Data-data yang diperoleh tersebut kemudian dielaborasi berdasarkan kinerja dari pemerintah RI dan Biofarma, kemudian dikaitkan dengan peraturan dan undang-undang kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah RI. Metodologi riset ini bersifat deskriptif analitik, dengan mengelompokkan masalah-masalah yang berkaitan dengan aspek paradiplomasi di bidang kesehatan terhadap aspek politik domestik Jawa Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktor-aktor Penyedia Vaksin Indonesia dari Pihak Tiongkok

Hubungan bilateral RI-RRT pada bidang kesehatan dinaungi oleh hubungan diplomatik antara kementerian-kementerian Indonesia dengan Pemerintah Beijing. Bantuan kesehatan yang diberikan Pemerintah Beijing terhadap Indonesia adalah melalui pengiriman vaksinasi Covid-19. Pada pertengahan tahun 2020 hingga sepanjang tahun 2021, Tiongkok berhasil memproduksi dan mengedarkan vaksin Sinovac ke Indonesia. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, penyakit yang ditimbulkan oleh virus Covid-19 mengalami mutasi genetika, sehingga memunculkan jenis varian baru, yaitu *omicron coronavirus* dan *delta coronavirus*. Fenomena ini mengharuskan kesiapan suatu negara untuk memproduksi vaksin yang dapat mencegah risiko dari paparan virus tersebut, yaitu melalui produksi vaksin jenis *booster*. Sebagai tanggapan mengenai kebutuhan vaksin *booster* di Indonesia, Pemerintah Beijing juga telah menawarkan bantuan finansial melalui kegiatan investasi di Indonesia. Pemerintah Beijing menunjuk Pemerintah Provinsi Fujian untuk berkontribusi terhadap hubungan diplomatik RI-RRT di bidang kesehatan.

Pada November 2021, Pemerintah Provinsi Fujian membentuk forum kerja sama yang dinamakan *Two Countries Twin Park* dan *Belt and Road Initiative (BRI)*. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk mengimplementasikan proyek kerja sama *Two Countries Twin Park*, sebagai model kerja sama berkelanjutan antara Indonesia dengan Tiongkok. Pembentukan proyek *Two Countries Twin Park* dan *Belt and Road Initiative (BRI)* yang bertujuan untuk mendorong perdagangan dan investasi di kedua negara (www.ekonomi.bisnis.com, 2021). Pemerintah Fujian juga berupaya untuk menguatkan interaksi kerja sama Indonesia dengan Anhui di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Pemerintah Fujian juga mendukung partisipasi Pemerintah Daerah Indonesia dalam memajukan kerja sama investasi dengan Provinsi Anhui.

Kontribusi Pemerintah Provinsi Anhui terhadap kerja sama vaksin Covid-19 yang dijalankan oleh PT Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, adalah dengan memberlakukan langkah-langkah

sebagai berikut: (1) Bantuan keuangan, (2) Bantuan teknis untuk keperluan manufaktur. (3) Bantuan fasilitas lokasi uji klinis untuk meningkatkan kualitas produk. (4) Bantuan untuk memperluas jaringan distribusi dan memperluas pasar perusahaan. (5) Memberikan fasilitas pengembangan produk baru di bidang bioteknologi (6) Memberikan bantuan pelatihan dan pendidikan, terhadap tenaga kerja di Anhui Zhifei untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi perusahaan. (7) Memfasilitasi komitmen perusahaan untuk keselamatan dan kesehatan kerja, serta lingkungan. (8) Memfasilitasi pengembangan bisnis di sektor-sektor lain yang relevan dengan PT Anhui Zhifei. 9) Memberikan bantuan terhadap kebutuhan fiskal untuk perusahaan Anhui Zhifei. 9 langkah dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Anhui bertujuan untuk menunjang kesiapan perusahaan tersebut sebelum bermitra dengan Indonesia.

Aktor-aktor Pelaksana Kerja sama Vaksin Anhui di Indonesia

Perwakilan dari pemerintah pusat RI yang menjalankan perencanaan kegiatan diplomasi vaksin RI-Anhui adalah Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi, dan Menteri BUMN RI Erick Thohir. Pihak yang menerima saluran dana investasi dari Anhui Zhifei adalah PT BCHAT Bioteknologi Indonesia. Pihak yang membuat rekombinasi genetika terhadap vaksin Zifivax buatan Anhui adalah PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia (Biotis).

Pelaksanaan uji klinis vaksin Anhui terhadap manusia dilakukan di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. Untuk provinsi DKI Jakarta, pelaksanaan uji klinis vaksin ini dilakukan oleh PT Bbiotis Pharmaceutical, sedangkan untuk Provinsi Jawa Barat, pelaksanaan uji klinis vaksin Anhui dilakukan oleh Pusat Akademik Inovasi Teknologi dan Riset Kesehatan dari Universitas Padjadjaran. Kegiatan uji klinis vaksin Anhui mulai dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2021. Uji klinis vaksin Anhui terhadap relawan dilakukan sebanyak 2 kali. Jarak penyuntikan pada relawan uji klinis adalah 3-5 bulan setiap dosisnya.

Peraturan terhadap uji klinis vaksin Anhui tercantum pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 61 Tahun 2021, dalam pasal 1 ayat 4, mengatakan bahwa pelaksanaan uji klinis vaksin Covid-19 di Indonesia dilakukan berdasarkan pengawasan penuh oleh Pemerintah Daerah, sehingga meminimalisir kerugian yang bisa mengancam keselamatan pasien uji klinis. Selain itu, pada pasal 1 ayat 5, dijelaskan pula pengembangan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam negeri merupakan cara yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan promosi daerah, yang bersifat *promotive*, *preventive*, *curative*, dan *rehabilitative* terhadap pencegahan terhadap ancaman wabah di wilayahnya (Pergub DKI Jakarta No. 61, 2021).

Pemerintah Provinsi Jawa Barat turut mendukung terhadap pelaksanaan uji klinis vaksin Anhui di Jawa Barat. Selain itu, Lembaga Badan POM RI juga berkontribusi dalam mengawasi teknik pengolahan dan rekombinasi dari kandungan vaksin Zifivax yang dilakukan oleh PT Biotis Biopharmaceutical. BPOM menetapkan standar yang ketat untuk menyetujui izin edar vaksin penyakit baru, sehingga proses menciptakan vaksin yang aman dan efektif untuk mencegah infeksi Covid-19 memerlukan waktu. Hingga pada bulan November 2021, BPOM menyatakan bahwa vaksin Zifivax buatan Anhui ini tergolong aman. Selain itu, fatwa MUI juga memberikan sertifikasi halal pada vaksin Anhui.

Kegiatan uji klinis vaksin Anhui terus dilakukan, dan pengecekan terhadap relawan uji klinis terus dipantau oleh satgas Covid-19 dari pihak Unpad. Hingga pada tanggal 11 Maret 2022, Badan POM telah menerbitkan Persetujuan Penggunaan Fasilitas *Fill & Finish* Vaksin COVID-19 PT Biotis untuk dikemas dalam injeksi volume berskala kecil Vaksin COVID-19 Zifivax dalam vial. Sebagai langkah perbaikan berkesinambungan, selanjutnya PT Biotis tetap diminta melaporkan hasil pelaksanaan validasi proses dan validasi pembersihan peralatan produksi Vaksin Zifivax (www.pom.go.id, 2022). vaksin Anhui membrtikan dampak yang baik terhadap kondisi kesehatan bagi

masyarakat Jawa Barat. Program sehingga dapat mencukupi kebutuhan masyarakat terhadap vaksin Covid-19.

Terkait jaringan vaksinasi di daerah Jawa Barat, periset memperoleh hasil wawancara dengan pihak *Digital Healthcare Biofarma Branch* Jakarta. Program ini berkaitan dengan upaya menjangkau kebutuhan alat medis melalui jaringan aplikasi kesehatan. Bisnis yang dijalankan oleh aplikasi Medical track Biofarma disesuaikan dengan permintaan pasar melalui layanan IT.

Aplikasi tersebut diberi nama Medbiz, yang mulai diresmikan pada bulan Agustus 2022. Aplikasi Medbiz membantu pendataan berbagai instansi kesehatan terkait stok vaksin Covid-19. Aplikasi ini membantu mengedarkan vaksin Covid-19 yang dikembangkan oleh Biofarma ke berbagai daerah di Indonesia. Aspek yang mendorong Biofarma untuk menggunakan aplikasi Medbiz berkaitan dengan kepentingan bisnis, untuk membantu perusahaan farmasi Indonesia agar bisa mendorong perekonomian dalam negeri.

Paradiplomasi Jabar-Anhui

Paradiplomasi Jabar-Anhui mengikuti indikator *conservative paradiplomacy*. Berikut adalah tabel model analisis dalam riset ini:

No.	Indi-cators	Types	Conservative Paradiplomacy
1	Kebijakan Luar Negeri RI-RRT di bidang kesehatan		Kebijakan luar negeri dalam bidang kesehatan yang diaplikasikan oleh RI dan RRT dilandasi oleh <i>International Health Regulations (IHR)</i> yang disahkan pada tahun 2005.
2	Hubungan Diplomatik RI-RRT		Hubungan diplomatik RI-RRT diawali oleh pertemuan antara kementerian-kementerian dari pihak RI dengan kementerian dari pihak RRT, dan Pimpinan Daerah dari Provinsi Anhui, untuk membuat kesepakatan kerja sama mengenai produksi vaksinasi Covid-19 di Indonesia.
3	Pembuatan Dokumen kerja sama RI-RRT		Perjanjian kerja sama Anhui dengan Indonesia dilandasi oleh MoU yang disahkan pada tahun 2013. Implementasi kerja sama RI-RRT di bidang kesehatan dilandasi oleh <i>MoU between the Department of Health RI and the Ministry of Public Health PRC</i> .
4	Peluang Investasi luar negeri RRT		Pemerintah Provinsi Anhui memberikan penawaran untuk investasi dari PT Anhui Zhifei, terhadap perusahaan multinasional farmasi milik Indonesia, yaitu PT BCHT dan PT Biotis Biopharmaceutical.

Tabel 2. Model Analisis Riset Conservative Paradiplomacy Indonesia

Dalam pemaparan pada tabel di atas, dapat dijabarkan bahwa interaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Jawa Barat dengan aktor Perusahaan Multinasional Anhui Zhifei dilandasi oleh 4 indikator paradiplomasi. Periset akan menganalisis berdasarkan indikator paradiplomasi Jabar-Anhui berdasarkan penafsiran ketentuan paradiplomasi yang diberlakukan oleh Indonesia dan Tiongkok.

1. Indikator Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri Indonesia dan Tiongkok memiliki kesamaan yang signifikan, yaitu dari segi pemberian kewenangan, keduanya sama-sama bersifat sentralistik dan dikendalikan oleh pemerintah pusat. Dalam riset ini, landasan dari kerja sama RI-RRT di bidang kesehatan dikendalikan oleh IHR 2005. Sistem kebijakan luar negeri yang dimiliki oleh RI-RRT sama-sama bersifat terbuka.

2. Indikator Hubungan Diplomatik

Landasan dalam penerapan hubungan diplomatik RI-RRT dilakukan melalui pertemuan antara pimpinan-pimpinan dari kedua belah pihak. Di Indonesia, pertemuan diplomatik dengan luar negeri harus diawali oleh pimpinan pusat. Landasan hubungan diplomatik yang dijalankan oleh RI selalu bersifat meluas, dan melingkupi kebutuhan nasionalnya. Pembangunan daerah merupakan bentuk pengembangan dari perjanjian diplomatik yang sudah terbentuk, sehingga pemerintah daerah bertugas untuk menjalani arahan dari perjanjian yang sudah ditentukan.

Berbeda dengan Indonesia, sistem hubungan diplomatik yang diaplikasikan oleh Tiongkok bertujuan untuk membangun pertumbuhan daerahnya. Hal ini memungkinkan pimpinan dari suatu daerah di Tiongkok untuk menghadiri pertemuan diplomatik dengan luar negeri. Akan tetapi, Tiongkok mengklasifikasikan pada 4 tingkatan wilayah subnasionalnya. Setiap lapisan wilayah subnasional di Tiongkok memiliki tanggung jawab yang bertumpu pada masing-masing tingkatan, serta tidak semua wilayah subnasional diberikan kewenangan yang sama.

3. Indikator Pembuatan Dokumen Kerja sama Dokumen kerja sama luar negeri dilandasi oleh MoU yang disahkan pada setiap pertemuan diplomatik yang dijalankan secara rutin. RI dan RRT sudah mengaplikasikan MoU di bidang kesehatan dengan kinerja yang cukup baik, karena ada campur tangan dari Departemen Kesehatan RI dan Departemen Kesehatan RRT. Akan tetapi, periset menemukan permasalahan yang signifikan terhadap MoU *Investment Promotion Cooperation between The Ministry Of Trade Republic Of Indonesia, and Anhui Province of The People's Republic of China* yang disahkan pada tahun 2013.

Dalam MoU tersebut, kewenangan diberikan pada aktor-aktor non-negara dari Anhui terhadap pemerintah daerah. MoU tersebut berlaku hingga tahun 2018, akan tetapi, tidak ada upaya perpanjangan dari pihak BKPM RI maupun Pemerintah Daerah Anhui untuk memperpanjang kontrak MoU tersebut hingga saat ini. Padahal, pelaksanaan kerja sama Anhui Zhifei dengan Biotis sudah dilaksanakan sejak tahun 2021. Landasan dari kinerja Biotis-Anhui didasarkan pada Pergub DKI Jakarta tahun 2021, dan MoU tentang Kerja sama kesehatan yang disahkan di tahun 2020.

4. Peluang Investasi luar Negeri bagi RRT

Peluang investasi bagi pemerintah daerah RI bertujuan untuk menunjang bantuan kemanusiaan di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan komunitas unggulan. Akan tetapi, Tiongkok memandang interaksi ekonomi di bidang investasi sebagai bisnis yang menguntungkan bagi Tiongkok sendiri. Dalam fenomena ini, Pemerintah Tiongkok mendorong Pemerintah Daerah Anhui untuk melakukan kerja sama luar negeri di negara yang berpotensi, dan memiliki stabilitas ekonomi yang baik seperti Indonesia.

KESIMPULAN

Interaksi yang dijalankan oleh GHSA memberikan kesempatan bagi aktor-aktor multinasional dalam menangani isu kesehatan global. IHR 2005 menciptakan peluang kerja sama di bidang kesehatan bagi negara-negara yang ikut serta dalam GHSA. Indonesia merupakan salah satu negara anggota steering group, dan menjadi ketua GHSA Troika pada tahun 2016. Pada pertemuan GHSA tahun 2016, Indonesia mendorong pengembangan *Joint External Assessment (JEE)* agar dapat dijadikan alat oleh WHO, untuk memperkuat implementasi kebijakan kesehatan yang sudah disahkan oleh IHR 2005.

Kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya adalah national action plan for *global health security*, yaitu usaha dalam penguatan kelembagaan pada tingkat pusat dan daerah. melalui instruksi dari pemerintah pusat terhadap outbreaks dalam GHSA, yaitu mengenai pencegahan, deteksi, dan penanggulangan terhadap penyebaran penyakit epidemi global. Sebagai langkah dalam mencapai kepentingan tersebut, Indonesia mengembangkan industri kesehatan dalam negeri melalui 3 sektor, yang diantaranya adalah: (1) Sektor farmasi, berupa pengembangan dan uji klinis terhadap produk obat-

obatan dan vaksin, (2) Sektor logistik, berupa fasilitas dan kelengkapan alat-alat kesehatan, (3) Sektor perdagangan, berupa penyediaan barang dan jasa di bidang kesehatan. Hal ini membuka peluang bagi luar negeri untuk melakukan kerja sama vaksin dengan Indonesia.

Seiring dengan penyebaran penyakit Covid-19 di wilayah Jawa Barat, Indonesia berupaya untuk memproduksi vaksin Covid-19 dalam negeri. Berdasarkan usaha Indonesia dalam mengembangkan industri vaksin dalam negeri, Pemerintah Provinsi Anhui memiliki tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Meskipun kepentingan utama dalam investasi Anhui terhadap PT Biotis adalah untuk mencari keuntungan dalam mempromosikan produk vaksin buatannya, kinerja aktor-aktor subnasional dari RI tetap memprioritaskan pada keselamatan masyarakat di Indonesia, sehingga vaksin Anhui mendapat izin edar yang sah dalam pasar farmasi Indonesia. Hasil dari interaksi kerja sama vaksin yang dilakukan antara Perusahaan Anhui Zhifei dengan PT Biotis membuahkan hasil yang baik, sehingga kebutuhan vaksin Covid-19 dapat teratasi hingga tahun 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Global Health Security Agenda (GHS) 2018: Retrieved from <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20181102/2028468/global-health-security-agenda-ghsa-2018/>
- Information of The Economist Intelligence Unit. (2020). Retrieved from: <https://www.eiu.com>
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI. (2020). Retrieved from: <https://www.maritim.go.id>
- Peraturan BPK No. 3 Tahun 2020, mengenai Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa, dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok. (2020). BPK RI.
- Badan POM Bangun Akses Vaksin COVID. Diakses dari: <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/646/Pengawasan-Badan-POM-Bangun-Akses-Vaksin-COVID-19.html>
- Aldila, N. (2021, 01 14). Retrieved from Luhut Bahas Kawasan Industri Two Countries Twin Park dengan Menlu China: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210114/9/1342782/luhut-bahas-kawasan-industri-two-countries-twin-park-dengan-menlu-china>
- Alvarenga, e. a. (2020). Challenges for the Brazilian State from the COVID-19 Pandemic: the Case of Paradiplomacy in the State of Maranhão *Desafios. Journal of Public Health*, 36, 1-14.
- Covid-19 Hotline*. (2020). Retrieved from <https://covid19.go.id/id>
- Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit*. (2018, 11 06). Retrieved from GHS Ke-5 : Indonesia Prioritaskan Kesehatan Dalam Agenda Pembangunan Nasional Untuk Mewujudkan Keamanan Kesehatan Global: <http://p2p.kemkes.go.id/ghsa-ke-5-indonesia-prioritaskan-kesehatan-dalam-agenda-pembangunan-nasional-untuk-mewujudkan-keamanan-kesehatan-global/>
- Dobbs, M. (2020). National Governance of Public Health Responses in a Pandemic? *European Journal of Risk*, 240-248.
- Feldbaum, H. &. (2010). Health Diplomacy and the Enduring Relevance of Foreign Policy Interests. *Plos Medicine*, 55-102.
- Fidler, C. H. (2013). *The Oxford Handbook of Modern Diplomacy*. Oxford University Press.
- (1999). *Hubungan Luar Negeri*. Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 tahun 1999.
- IDN Times*. (2020, 01 25). Retrieved from Kronologi Warga Bali Terpapar Varian COVID-19 B.1351 Hingga Meninggal: <https://www.idntimes.com/news/indonesia/dini-suciatiningrum/kronologi-warga-bali-terpapar-varian-covid-19-b1351-hingga-meninggal>
- Kedutaan Besar Republik Indonesia Beijing, RRT Merangkap Mongolia*. (2016, 11 30). Retrieved from Investasi & Perdagangan Indonesia: <https://kemlu.go.id/beijing/id/read/investasi-perdagangan-di-indonesia/2399/etc-menu>
- Kedutaan Besar Republik Indonesia Beijing, RRT Merangkap Mongolia*. (2022, 09 20). Retrieved from Two Countries Twin Park RI - China Economic Cooperation Corridor: <https://www.kemlu.go.id/beijing/en/news/20943/two-countries-twin-park-ri-china-economic-cooperation-corridor>

- Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bratislava, Republik Slowakia.* (2021, 01 13). Retrieved from Menlu RI terpilih sebagai Co-Chair AMC Engagement Group: <https://kemlu.go.id/bratislava/id/news/10704/menlu-ri-terpilih-sebagai-co-chair-amc-engagement-group>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.* (2018, 11 02). Retrieved from Global Health Security Agenda (GHS): <https://www.kemkes.go.id/article/print/18110200001/global-health-security-agenda-ghsa-2018.html>
- Kementerian Kesehatan RI Kantor Kesehatan Pelabuhan Makassar.* (2022). Retrieved from Global Health Security Agenda (GHS): <https://kkpmakassar.com/news/detail/91>
- Kesehatan untuk Semua: Strategi Diplomasi Kesehatan Global Indonesia.* Kementerian Luar Negeri Indonesia, Jakarta.
- Kurnia, T. (2021, 01 12). *Liputan6.com.* Retrieved from Indonesia Jadi Negara Asia Pertama Selain China yang Izinkan Penggunaan Vaksin COVID-19 Sinovac: <https://www.liputan6.com/global/read/4455610/indonesia-jadi-negara-asia-pertama-selain-china-yang-izinkan-penggunaan-vaksin-covid-19-sinovac>
- Lardo, S. (2021, 07 11). Retrieved from Global Health Security Agenda (GHS) : Dalam Perspektif Kebijakan Infeksi: <https://soroylardo.com/2019/02/14/global-health-security-agenda-ghsa-dalam-perspektif-kebijakan-infeksi/>
- Margono, e. a. (2021). Aktivitas Diplomasi Kesehatan Indonesia-Tiongkok di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Sentris Edisi Khusus Diplomasi* , 285-306.
- Muhamin, e. a. (2021). Diplomasi Vaksin Covid-19 dan Budaya Anarki dalam Sistem Internasional [Covid-19 Vaccine Diplomacy and Cultures of Anarchy in The International System]. *Jurnal Politica: Dinamika Masalah Politik dalam Negeri & Hubungan Internasional*, 21, 143-160.
- Mukti, T. A. (n.d.).
- Mukti, T. A. (2013). *Paradiplomasi Kerja sama Luar Negeri Pemda Indonesia.* Yogyakarta: The Phinisi Press.
- Mukti, T. A. (2020). *Politik Paradiplomasi dan Isu Kedaulatan Indonesia.* Yogyakarta: The Phinisi Press.
- Mukti, T. A. (2020). *Politik Paradiplomasi dan Isu Kedaulatan Indonesia.* Yogyakarta: The Phinisi Press.
- Open Data Jabar.* (2021, 09 03). Retrieved from Kecepatan Harian Vaksinasi Covid-19 di Jawa Barat Terus Ditingkatkan!: <https://opendata.jabarprov.go.id/id/infografik/kecepatan-harian-vaksinasi-covid-19-di-jawa-barat-terus-ditingkatkan!>
- Oratmangun, D. (2020, 12 22). *Kompas.com.* Retrieved from Indonesia-China: Membangun Kemitraan, Sinergi, dan Solidaritas: <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/22/18420681/indonesia-china-membangun-kemitraan-sinergi-dan-solidaritas>
- (2007). *Peraturan Menteri Luar Negeri No. 3.* Provinsi DKI Jakarta: Departemen Luar Negeri.
- Purnama, e. a. (2020). Pandemi Covid-19, Perubahan Sosial dan Konsekuensinya Pada Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 25, 61-80.
- Watson, A. (1984). *Diplomacy. The Dialogue Between States.* Routledge: Taylor and Francis Group.
- Whytock, C. A. (2005). Who "Won" Libya?: The Force-Diplomacy Debate and Its Implications for Theory and Policy. *Journal of International Security*, 30, 47-86.
- Widiyani, R. (2020, March 18). *detiknews.* Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-4943950/latar-belakang-virus-corona-perkembangan-hingga-isu-terkini>
- Wolff, S. (2009). *Paradiplomacy: Scope, Opportunities and Challenges*. University of Nottingham.
- Yuli Saputra. (2021, 03 04). *BBC News Indonesia.* Retrieved from Covid-19: Uji klinis vaksin Anhui, apa bedanya dengan Sinovac?: <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-56275393>

BIOGRAFI

Dinda Citra Widyani merupakan mahasiswi Program Studi Magister Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung. Memiliki ketertarikan pada kajian dan berbagai jenis interaksi diplomasi dan kerja sama luar negeri, yang berkaitan dengan *human security* dalam studi Hubungan Internasional.

RMT Nurhasan Affandi merupakan dosen pengajar dari Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung. Memiliki ketertarikan pada bidang *behavioural and international studies*, serta kerja sama antara pemerintah-pemerintah daerah dalam studi Hubungan Internasional.

Deasy Silvy Sari merupakan dosen pengajar dari Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung. Memiliki ketertarikan pada kajian kebijakan luar negeri, *economy and businesses international*, regionalisme, serta *international law* dalam studi Hubungan Internasional.